

TRANSFORMASI DIGITAL DALAM AKUNTANSI PUBLIK: STRATEGI ANTIKORUPSI MELALUI E-GOVERNMENT (Studi Empiris Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa)

*DIGITAL TRANSFORMATION IN PUBLIC ACCOUNTING: ANTI-CORRUPTION
STRATEGY THROUGH E-GOVERNMENT
(Empirical Study of the Regional Financial Management Agency
Gowa Regency)*

Tiara Dwi Febryanti^{1*}, Muh. Radiansyah², Aulia Altha Fany Ruslan³, Jamaluddin Majid⁴
^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

***Email Correspondence: tiaradwifwbryanti2@gmail.com**

Abstract

This study examines the effect of e-government implementation, consisting of e-planning, e-procurement, and e-budgeting, on public sector integrity at the Regional Financial Management Agency (BPKD) of Gowa Regency. This study employs a quantitative associative approach using primary data collected through questionnaires distributed to BPKD officials. Data analysis is conducted using regression techniques to examine both direct effects and the moderating role of human resource competence. The results are expected to indicate that e-planning, e-procurement, and e-budgeting have a positive and significant effect on public sector integrity, and that human resource competence strengthens the relationship between e-government implementation and public sector integrity. These findings highlight that the effectiveness of digital transformation in public sector accounting is highly dependent on the readiness and competence of government officials. This study is expected to contribute to the development of public sector accounting literature and provide practical insights for local governments in promoting transparent, accountable, and integrity-driven financial governance.

Keywords: E-Government, E-Planning, E-Procurement, E-Budgeting, Public Sector Integrity.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengaruh penerapan *e-government* yang meliputi *e-planning*, *e-procurement*, dan *e-budgeting* terhadap integritas sektor publik pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada aparatur BPKD. Analisis data dilakukan menggunakan teknik regresi untuk menguji pengaruh langsung serta peran kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian diharapkan menunjukkan bahwa *e-planning*, *e-procurement*, dan *e-budgeting* berpengaruh positif dan signifikan terhadap integritas sektor publik, serta kompetensi sumber daya manusia mampu memperkuat pengaruh penerapan *e-government* terhadap integritas sektor publik. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas transformasi digital dalam akuntansi publik sangat ditentukan oleh kesiapan dan kompetensi aparatur. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian akuntansi sektor publik serta masukan praktis bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Kata Kunci: E-Government, E-Planning, E-Procurement, E-Budgeting, Integritas Sektor Publik.

PENDAHULUAN

Korupsi masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pengelolaan keuangan sektor publik yang berdampak serius terhadap menurunnya kepercayaan masyarakat, inefisiensi anggaran, serta lemahnya akuntabilitas pemerintahan. Di Indonesia, praktik korupsi belum menunjukkan penurunan yang signifikan, tercermin dari peringkat indeks persepsi korupsi yang masih rendah serta meningkatnya kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi (Sahin, 2025; Indonesia *Corruption Watch*, 2023 dalam Iriyani & Mutmainah, 2024). Fenomena ini menunjukkan bahwa reformasi tata kelola dan pengawasan keuangan publik masih menghadapi berbagai keterbatasan, khususnya di tingkat pemerintah daerah.

Dalam perspektif *Agency Theory*, aparatur pemerintah bertindak sebagai agen yang mengelola sumber daya publik atas mandat masyarakat sebagai principal (Jensen & Meckling, 1976). Hubungan ini rentan terhadap konflik kepentingan akibat asimetri informasi yang mendorong munculnya perilaku oportunistik agen, seperti penyalahgunaan wewenang, manipulasi anggaran, dan rekayasa administrasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (Maria & Halim, 2021). Praktik korupsi dalam bentuk penyuapan, penggelapan, nepotisme, dan pemerasan mencerminkan lemahnya mekanisme pengawasan konvensional dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas keuangan publik (Setyobudi & Setyaningrum, 2019).

Sejalan dengan itu, *Institutional Theory* menjelaskan bahwa organisasi publik cenderung menyesuaikan diri terhadap tekanan institusional guna memperoleh legitimasi dan kepercayaan masyarakat (Meyer & Rowan, 1977). Tekanan regulatif, normatif, dan mimetik mendorong pemerintah daerah mengadopsi e-government sebagai respons atas tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan yang baik (Ahyaruddin & Akbar, 2017; Winarni & Zamakhsyari, 2022). Penerapan sistem elektronik seperti *e-planning*, *e-budgeting*, dan *e-procurement* dipandang sebagai strategi untuk memperkuat pengawasan, mempersempit ruang manipulasi anggaran, serta menciptakan jejak audit yang lebih transparan (Ekowati, 2024; Rustiarini, 2019).

Namun, fenomena empiris menunjukkan bahwa penerapan *e-government* di Indonesia belum sepenuhnya efektif dalam menekan praktik korupsi di tingkat daerah. Di Kabupaten Gowa, masih ditemukan berbagai kasus penyimpangan anggaran, seperti proyek rehabilitasi jaringan irigasi Bendungan Bili-bili yang tidak sesuai spesifikasi serta penyalahgunaan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di RSUD Syekh Yusuf. Kasus-kasus tersebut mengindikasikan adanya rekayasa administrasi, lemahnya pengawasan, serta belum optimalnya integrasi sistem digital dalam pengelolaan keuangan daerah, meskipun regulasi dan sistem pengendalian telah diterapkan.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa *e-government* berpotensi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sektor publik, namun efektivitasnya tidak bersifat universal dan sangat bergantung pada kesiapan organisasi, integrasi sistem, kompetensi sumber daya manusia, serta komitmen integritas aparatur (Rustiarini, 2019; Manurung et al., 2019). Bahkan, praktik informal dan interaksi non-prosedural masih kerap terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa meskipun telah menggunakan sistem e-procurement (Maytandi & Abbas, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa adopsi teknologi semata belum cukup untuk mengendalikan perilaku oportunistik aparatur publik.

Berdasarkan kondisi tersebut, masih terdapat *research gap* terkait sejauh mana penerapan *e-government*, khususnya melalui sistem *e-planning*, *e-budgeting*, dan *e-procurement*, benar-benar efektif sebagai instrumen pengendalian korupsi di tingkat pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penerapan *e-government* dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan dan menekan praktik

korupsi di Kabupaten Gowa, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi penguatan tata kelola pemerintahan daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Agency Theory

Teori Agensi menjelaskan hubungan kerja delegatif antara prinsipal (masyarakat) dan agen (pemerintah) yang rentan terhadap konflik akibat perilaku oportunistik agen (Jensen & Meckling, 1976). Mekanisme akuntabilitas dan pengawasan yang kuat melalui teori ini menjadi instrumen antikorupsi yang krusial untuk memastikan agen bertindak selaras dengan tujuan organisasi dan kepentingan publik (Masyhuri, 2024; Mayasaari & Arman, 2023). Dalam perkembangannya, teori ini bertransformasi menjadi *sustainability agency theory* yang menekankan peran agen tidak hanya dalam dimensi ekonomi, tetapi juga dalam menjaga nilai sosial dan keberlanjutan organisasi (Yang et al., 2025; Wilhelm et al., 2024).

Institutional Theory

Teori Institusional menekankan bahwa perilaku organisasi dibentuk oleh tekanan eksternal berupa norma sosial, budaya, dan regulasi demi memperoleh legitimasi di lingkungannya (Meyer & Rowan, 1977). Organisasi publik cenderung mengadopsi praktik tata kelola tertentu sebagai respon terhadap dorongan koersif, normatif, dan mimetik, yang sering kali lebih diutamakan daripada efisiensi teknis (Ceschel et al., 2022; Janićijević, 2014). Dalam konteks birokrasi, perubahan menuju pemerintahan bersih terjadi bukan sekadar karena reformasi struktural, melainkan karena adaptasi terhadap tuntutan nilai dan prinsip *good governance* yang telah terinstitusionalisasi (Nur et al., 2025; Ponte & Pesci, 2022).

Public Sector Integrity

Integritas sektor publik mencerminkan komitmen aparatur negara terhadap kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab moral dalam menjalankan tugas pemerintahan (Yadav, 2024). Sebagai fondasi utama tata kelola yang bersih, integritas berfungsi meminimalisir peluang korupsi melalui internalisasi etika birokrasi dan penguatan sistem kontrol internal yang berkelanjutan (Ceschel et al., 2022; Ilmi Farikhoh, 2022). Implementasi nilai-nilai ini tidak hanya meningkatkan moralitas individu, tetapi juga menegaskan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah (Siahay, 2023; Saptiyana & Astuti, 2022).

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi SDM menempati posisi sentral dalam efektivitas implementasi sistem digital, di mana kemampuan aparatur dalam mengoperasikan teknologi informasi menentukan kualitas layanan publik dan akuntabilitas organisasi (Herwanto et al., 2024). Pengembangan kompetensi yang sistematis melalui pelatihan dan literasi teknologi sangat krusial untuk menjamin keberlanjutan transformasi digital di sektor publik (Akbar & Soemartono, 2025; Yuditiya et al., 2023). Dengan adanya standar kompetensi yang jelas, organisasi dapat memastikan bahwa kapasitas SDM mampu mendukung integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik secara optimal (Yufrizal, 2024; Rahmadi & Rusmiati, 2025).

E-Planning

E-Planning merupakan instrumen digitalisasi perencanaan yang bertujuan mengurangi asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat melalui sistem informasi yang terbuka (Putriani & Fanida, 2022; Maria & Halim, 2021). Dengan mendokumentasikan rencana pembangunan secara digital, sistem ini membatasi diskresi

pejabat untuk melakukan perubahan anggaran secara sepihak di luar mekanisme yang sah (Putriani & Fanida, 2022). Efektivitas *e-planning* sebagai langkah awal pencegahan korupsi sangat bergantung pada integrasi sistem dan dukungan pengendalian internal yang kuat guna menjamin transparansi perencanaan daerah (Winarni & Zamakhsyari, 2022; Iriyani & Mutmainah, 2024).

E-Procurement

E-Procurement mengdigitalisasi proses pengadaan barang dan jasa untuk menciptakan transparansi real-time dan meminimalisir interaksi tatap muka yang rawan terhadap praktik suap (Ayu Wananda et al., 2025; Nugraha & Kartini, 2025). Implementasi platform elektronik ini meningkatkan efisiensi fiskal serta memberikan sinyal kredibilitas pemerintah dalam mengelola sumber daya publik secara akuntabel (Hochstetter et al., 2023). Meskipun demikian, keberhasilan sistem ini tetap memerlukan integritas aparatur sebagai faktor non-teknis yang krusial untuk memastikan prosedur pengadaan berjalan sesuai prinsip keberlanjutan (Maytandi & Abbas, 2020; Winardi, 2024).

E-Budgeting

E-Budgeting bertindak sebagai pilar digitalisasi pengelolaan anggaran yang meningkatkan keterbukaan dan memitigasi risiko penyimpangan dana melalui sistem informasi berbasis web (Prayoga & Yuhertiana, 2021; Saputra et al., 2019). Sistem ini mempersempit ruang gerak untuk praktik mark-up dengan menyediakan jejak audit yang kuat serta membatasi interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan perilaku oportunistik (Ekowati, 2024; Winardi, 2024). Secara keseluruhan, *e-budgeting* mendukung terciptanya integritas sektor publik dengan menyediakan data anggaran yang transparan bagi pengawas dan masyarakat sepanjang siklus keuangan daerah (Winarni & Zamakhsyari, 2022; Rustiarini, 2019).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif untuk menganalisis pengaruh penerapan *e-planning*, *e-procurement*, dan *e-budgeting* terhadap public sector integrity dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi. Penelitian dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Gowa dengan populasi seluruh pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah, di mana sampel dipilih menggunakan *purposive sampling* berdasarkan kriteria keterlibatan langsung dalam penggunaan sistem digital pemerintahan dan masa kerja minimal satu tahun. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner tertutup menggunakan skala Likert 4 poin, kemudian dianalisis dengan bantuan SPSS melalui tahapan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, serta analisis regresi linear berganda dan regresi moderasi untuk menguji hubungan antarvariabel penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

a) Uji Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
E-Planning	35	15.00	20.00	17.6000	1.75231
E-Procurement	35	15.00	20.00	17.9714	1.79026
E-Budgeting	35	15.00	20.00	17.8857	1.81126
Kompetensi SDM	35	15.00	20.00	17.5143	1.91544
Public Sector Integrity	35	15.00	20.00	17.4571	1.93030
Valid N (listwise)	35				

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, seluruh variabel penelitian diukur dari 35 responden dengan rentang skor minimum 15,00 dan maksimum 20,00, yang menunjukkan kecenderungan jawaban pada kategori tinggi. Variabel *e-planning*, *e-procurement*, dan *e-budgeting* memiliki nilai rata-rata yang relatif tinggi dengan sebaran data yang homogen, menandakan penerapan sistem *e-government* dinilai berjalan cukup baik hingga optimal. Kompetensi sumber daya manusia dan public sector integrity juga menunjukkan nilai rata-rata yang baik, meskipun memiliki variasi jawaban responden yang sedikit lebih beragam, sehingga mencerminkan adanya perbedaan persepsi, namun secara umum tetap menggambarkan kondisi yang positif di BPKD Kabupaten Gowa.

b) Uji Instrumen Penelitian

1) Uji Validitas

Uji validitas dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Tingkat validitas diukur dengan membandingkan nilai hitung *r* (correlation item total correlation) dengan nilai tabel *r* untuk *degree of freedom* ($df = n - k$) dengan $\alpha 0,05$ (Sugiyono, 2019).

Correlations						
		E-Planning	E-Procurement	E-Budgeting	Kompetensi SDM	Public Sector Integrity
E-Planning	Pearson Correlation	1	,745**	,635**	,548**	,714**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,001	,000
	N	35	35	35	35	35
E-Procurement	Pearson Correlation	,745**	1	,752**	,579**	,740**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000
	N	35	35	35	35	35
E-Budgeting	Pearson Correlation	,635**	,752**	1	,619**	,534**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,001
	N	35	35	35	35	35
Kompetensi SDM	Pearson Correlation	,548**	,579**	,619**	1	,492**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,000		,003
	N	35	35	35	35	35
Public Sector Integrity	Pearson Correlation	,714**	,740**	,534**	,492**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,001	,003	
	N	35	35	35	35	35

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa seluruh nilai *r* hitung antar variabel, yaitu *E-Planning*, *E-Procurement*, *E-Budgeting*, Kompetensi SDM, dan *Public Sector Integrity*, memiliki nilai *r* hitung (*Pearson Correlation*) yang lebih besar daripada *r* tabel (0,3338). Selain itu, nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) yang dihasilkan seluruhnya lebih kecil dari 0,05, bahkan sebagian besar berada pada tingkat signifikansi 0,01. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen penelitian dinyatakan valid, karena nilai *r* hitung > *r* tabel dan nilai signifikansi < 0,05.

2) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk menilai konsistensi instrumen penelitian dalam mengukur variabel yang diteliti. Instrumen dikatakan reliabel apabila mampu memberikan hasil yang relatif sama ketika pengukuran dilakukan berulang kali pada objek yang sama. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha* (α) sebagaimana dikemukakan oleh Ghazali (2021).

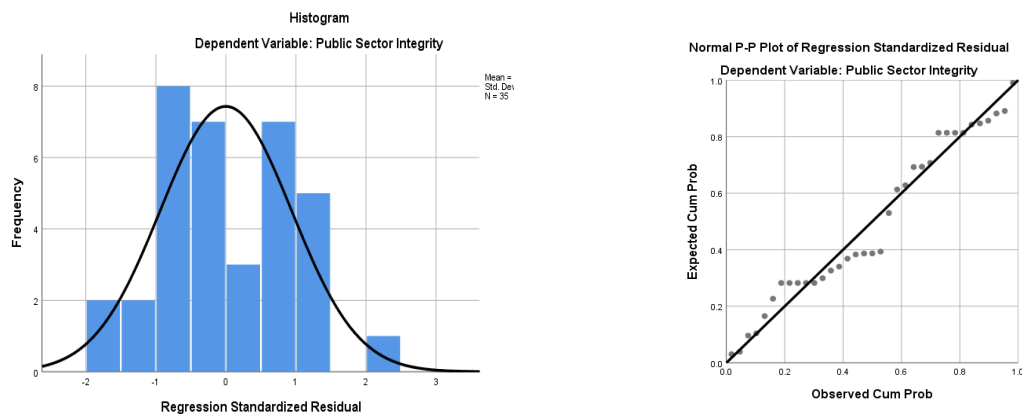
Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,848	,915	5

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang disajikan pada Tabel Reliability Statistics, diperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,848 dengan jumlah item sebanyak 5 pernyataan. Nilai Cronbach's Alpha tersebut lebih besar dari batas minimum yang ditetapkan, yaitu 0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian dinyatakan reliabel.

c) Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan salah satu uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah data residual dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2006).



Berdasarkan hasil uji normalitas secara grafis, dapat dilihat bahwa histogram residual menunjukkan pola distribusi yang mendekati bentuk lonceng (*bell-shaped*) dan tidak condong ke kiri maupun ke kanan secara ekstrem. Hal ini mengindikasikan bahwa data residual dalam model regresi cenderung berdistribusi normal. Selain itu, pada Normal P-P Plot of *Regression Standardized Residual*, terlihat bahwa titik-titik data menyebar di sekitar dan mengikuti arah garis diagonal. Penyebaran titik yang tidak menjauh secara signifikan dari garis diagonal menunjukkan bahwa residual memenuhi asumsi normalitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas, sehingga layak digunakan untuk analisis regresi selanjutnya

2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan yang kuat antar variabel independen dalam model regresi (Ghozali, 2006).

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.987	3.505		2.564	.016		
	E-Planning	-.294	.327	-.267	-.899	.376	.293	3.418
	E-Procurement	.627	.345	.581	1.819	.079	.252	3.967
	E-Budgeting	-.070	.281	-.066	-.249	.805	.370	2.705
	Kompetensi SDM	.207	.212	.206	.979	.335	.584	1.712

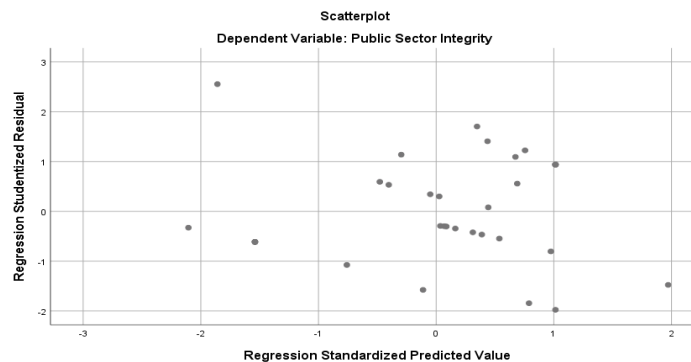
a. Dependent Variable: Public Sector Integrity

Berdasarkan Tabel *Coefficients (Collinearity Statistics)*, diperoleh nilai sebagai berikut: *E-Planning* (Tolerance = 0,293; VIF = 3,418), *E-Procurement* (Tolerance

= 0,252; VIF = 3,967), *E-Budgeting* (Tolerance = 0,370; VIF = 2,705), dan Kompensasi SDM (Tolerance = 0,584; VIF = 1,712). Mengacu pada kriteria umum (Tolerance > 0,10 dan VIF < 10), seluruh variabel independen pada model ini memenuhi syarat tersebut. Nilai VIF tertinggi sebesar 3,967 (pada *E-Procurement*) masih jauh di bawah ambang batas 10, sehingga tidak menunjukkan adanya multikolinearitas yang serius.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya (Ghozali, 2006).



Hasil pengujian heteroskedastisitas yang ditampilkan melalui grafik scatterplot menunjukkan bahwa sebaran titik residual tidak membentuk pola yang jelas dan tersebar secara tidak teratur di sekitar sumbu horizontal. Titik-titik tersebut berada baik di atas maupun di bawah garis nol, sehingga tidak menunjukkan adanya kecenderungan tertentu pada varians residual. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas dalam model regresi yang digunakan.

d) Uji Hipotesis

1) Uji t (Parsial)

Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	12,089	,439		27,561
	E-Planning	-,184	,055	-,528	-3,359
	E-Procurement	,669	,060	2,485	11,182
	E-Budgeting	-,191	,028	-1,145	-6,902

a. Dependent Variable: Public Sector Integrity

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial menggunakan uji t dengan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai t tabel sebesar 2,040, dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel independen dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, yaitu Public Sector Integrity. Hasil interpretasi atas hasil penelitian (H1, H2 dan H3) dapat dilihat sebagai berikut:

- a) *E-Planning* berpengaruh negatif terhadap *Public Sector Integrity*. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel *E-Planning* memiliki nilai t hitung sebesar -3,359, dimana nilai absolut t hitung lebih besar dari nilai t tabel ($|-3,359| > 2,040$). Nilai Sig untuk variabel *E-Planning* adalah 0.002. Karena nilai Sig. $0,002 < 0,05$, maka hipotesis 1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa *E-Planning* berpengaruh signifikan terhadap *Public Sector Integrity*. Dengan koefisien regresi yang negatif -3.359 yang menunjukkan hubungan yang negatif.
- b) *E-Procurement* berpengaruh positif terhadap *Public Sector Integrity*. Variabel *E-Procurement* memiliki nilai t hitung sebesar 11,182, dimana nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel ($11,182 > 2,040$). Nilai Sig untuk variabel *E-Procurement* adalah 0.000. Karena nilai Sig. $0,000 < 0,05$, maka hipotesis 2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa *E-Procurement* berpengaruh signifikan terhadap *Public Sector Integrity*. Dengan koefisien regresi yang positif 11.182 yang menunjukkan hubungan yang positif.
- c) *E-Budgeting* berpengaruh negatif terhadap *Public Sector Integrity*. Variabel *E-Budgeting* memiliki nilai t hitung sebesar -6,902, dimana nilai absolut t hitung lebih besar dari nilai t tabel ($|-6,902| > 2,040$). Nilai Sig untuk variabel *E-Budgeting* adalah 0.000. Karena nilai Sig. $0,000 < 0,05$, maka hipotesis 3 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa *E-Budgeting* berpengaruh signifikan terhadap *Public Sector Integrity*. Dengan koefisien regresi yang negatif -6.902 yang menunjukkan hubungan yang negatif.

2) Uji Regresi Moderasi

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	4,099	31,204		,131
	E-Planning	-5,044	3,264	-,4579	,134
	E-Procurement	9,073	3,451	,8415	,014
	E-Budgeting	-3,770	2,627	-,3538	,163
	Kompetensi SDM	,781	1,910	,775	,686
	X1Z	,272	,185	,7944	,154
	X2Z	-,500	,204	-,14941	,021
	X3Z	,213	,152	,6482	,173

a. Dependent Variable: Public Sector Integrity

- a) Diketahui bahwa nilai signifikansi variabel interaksi antara *E-planning* dengan kompetensi Sumber Daya Manusia (Z) sebesar 0,154 ($> 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik kompetensi SDM memperlemah pengaruh *E-planning* terhadap *Public Sector Integrity*.
- b) Interaksi *E-Procurement* × Kompetensi SDM. Diketahui bahwa nilai signifikansi variabel interaksi antara *E-procurement* dengan kompetensi Sumber Daya Manusia (Z) sebesar 0,021 ($< 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa kompetensi SDM memperkuat pengaruh *E-procurement* terhadap *Public Sector Integrity*.
- c) Interaksi *E-Budgeting* × Kompetensi SDM. Diketahui bahwa nilai signifikansi variabel interaksi antara *E-budgeting* dengan kompetensi Sumber Daya Manusia (Z) sebesar 0,173 ($> 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi SDM memperlemah pengaruh *E-Budgeting* terhadap *Public Sector Integrity*.

3) Uji F

Menurut Ghazali (2018), uji F bertujuan untuk menguji kelayakan model regresi, yaitu apakah model yang dibangun layak digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Uji F dilakukan untuk mengevaluasi kelayakan model regresi (*goodness of fit*) dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen.

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	47,025	7	6,718	2,277	,059 ^b
	Residual	79,661	27	2,950		
	Total	126,686	34			

a. Dependent Variable: Public Sector Integrity

b. Predictors: (Constant), X3Z, E-Planning, E-Procurement, E-Budgeting, Kompetensi SDM, X1Z, X2Z

Berdasarkan hasil olah data pada Tabel ANOVA, diperoleh nilai F hitung sebesar 2,277 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,059. Nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan F tabel pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$) dengan derajat kebebasan $df_1 = 7$ dan $df_2 = 27$, sehingga diperoleh nilai F tabel sebesar 2,37. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai F hitung $< F$ tabel ($2,277 < 2,37$) dan nilai signifikansi $0,059 > 0,05$. Secara statistik, hal ini mengindikasikan bahwa secara simultan variabel *e-Planning*, *e-Procurement*, *e-Budgeting*, Kompetensi SDM, serta variabel moderasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *Public Sector Integrity* pada taraf 5%. Namun, merujuk pada pandangan Hair et al. (2019), nilai signifikansi yang berada pada ambang batas (*marginal significance*) ini tetap menunjukkan bahwa model memiliki kapasitas yang cukup untuk menjelaskan fenomena secara kolektif. Dengan demikian, model penelitian ini tetap dinilai layak untuk dianalisis lebih lanjut melalui uji parsial (uji t) guna mengidentifikasi pengaruh spesifik dari masing-masing variabel yang terbukti signifikan secara individu.

4) Uji R²

Menurut Ghazali (2006), semakin tinggi nilai R², maka semakin baik model regresi yang dibangun, karena sebagian besar variasi dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen yang digunakan.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,609 ^a	,371	,208	1,71767

a. Predictors: (Constant), X3Z, E-Planning, E-Procurement, E-Budgeting, Kompetensi SDM, X1Z, X2Z

Nilai R sebesar 0,609 menunjukkan hubungan yang cukup kuat dan positif antara *e-planning*, *e-procurement*, *e-budgeting*, serta kompetensi SDM terhadap *Public Sector Integrity*. Nilai R^2 sebesar 0,371 berarti 37,1% variasi integritas sektor publik dapat dijelaskan oleh model, dengan *Adjusted R Square* sebesar 0,208 setelah penyesuaian. Kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen relatif lemah karena masih ada faktor lain di luar model yang memengaruhi integritas sektor publik. Nilai *Std. Error of the Estimate* sebesar 1,71767 menunjukkan tingkat kesalahan prediksi yang masih wajar, sehingga model regresi dinilai memiliki kemampuan prediksi yang memadai.

B. Pembahasan

1) *E-Planning* berpengaruh negatif terhadap *Public Sector Integrity* (H1)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-planning* berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap *public sector integrity*. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan sistem perencanaan berbasis elektronik belum sepenuhnya mampu meningkatkan keterbukaan dan kejelasan proses perencanaan kegiatan dan anggaran di instansi pemerintah. Kondisi ini membuka peluang terjadinya penyesuaian perencanaan yang kurang sesuai dengan ketentuan dan menyebabkan aparatur belum bekerja secara tertib dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap *public sector integrity*.

2) *E-Procurement* berpengaruh positif terhadap *Public Sector Integrity* (H2)

Hasil analisis membuktikan bahwa *e-procurement* berpengaruh positif terhadap *public sector integrity*. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi proses pengadaan barang dan jasa mampu menciptakan proses yang lebih transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan *e-procurement* membantu mengurangi interaksi langsung antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan serta mempermudah proses pengawasan. Dengan sistem pengadaan yang terbuka dan terdokumentasi secara elektronik, potensi penyimpangan dapat ditekan sehingga integritas sektor publik semakin meningkat.

3) *E-Budgeting* berpengaruh negatif terhadap *Public Sector Integrity* (H3)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-budgeting* berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap *public sector integrity*. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan sistem penganggaran berbasis elektronik belum sepenuhnya mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di instansi pemerintah. Meskipun seluruh proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran telah terdokumentasi secara elektronik, dalam praktiknya pemanfaatan *e-budgeting* belum diiringi dengan pemahaman yang memadai serta pengawasan yang optimal, sehingga proses penganggaran belum sepenuhnya mudah ditelusuri dan dikendalikan. Kondisi ini membuka peluang terjadinya penyesuaian anggaran yang kurang sesuai dengan ketentuan dan menyebabkan penggunaan anggaran belum sepenuhnya mencerminkan prinsip integritas, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap *public sector integrity*.

4) Kompetensi SDM memperkuat pengaruh *E-Planning* terhadap *Public Sector Integrity* (H4)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak memoderasi pengaruh *e-planning* terhadap *public sector integrity*. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengaruh *e-planning* terhadap integritas sektor publik sudah cukup kuat melalui mekanisme sistem yang ada, sehingga tidak banyak dipengaruhi oleh perbedaan tingkat kompetensi aparatur. Dengan kata lain, *e-planning* dapat

berjalan secara relatif efektif meskipun kompetensi pengguna bervariasi, karena sistem perencanaan telah memiliki prosedur dan standar yang jelas dalam pelaksanaannya.

- 5) Kompetensi SDM memperkuat pengaruh *E-Procurement* terhadap *Public Sector Integrity* (H5)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia mampu memoderasi pengaruh *e-procurement* terhadap *public sector integrity*. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan *e-procurement* dalam meningkatkan integritas sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparatur dalam memahami dan mengoperasikan sistem pengadaan elektronik. Aparatur yang memiliki kompetensi yang baik mampu menjalankan proses pengadaan secara lebih cermat, konsisten, dan sesuai prosedur, sehingga potensi kesalahan maupun penyimpangan dapat diminimalkan. Dengan demikian, kompetensi sumber daya manusia berperan penting dalam memperkuat dampak *e-procurement* terhadap integritas sektor publik.

- 6) Kompetensi SDM memperkuat pengaruh *E-Budgeting* terhadap *Public Sector Integrity* (H6)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak memoderasi pengaruh *e-budgeting* terhadap *public sector integrity*. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengaruh *e-budgeting* terhadap integritas sektor publik lebih ditentukan oleh sistem dan aturan penganggaran yang berlaku dibandingkan oleh kemampuan individu pengguna. Meskipun kompetensi aparatur tetap diperlukan dalam pelaksanaan *e-budgeting*, perannya belum cukup kuat untuk memperkuat hubungan antara *e-budgeting* dan integritas sektor publik secara signifikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian empiris dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat dirumuskan kesimpulan utama sebagai berikut:

- 1) *E-planning* dan *e-budgeting* sebagai instrumen e-government berpengaruh negatif terhadap public sector integrity. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan e-government dalam aspek perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya selaras dengan praktik integritas aparatur, sehingga keberadaan sistem tersebut belum secara optimal mendorong penguatan nilai-nilai integritas dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebaliknya, *e-procurement* berpengaruh positif terhadap public sector integrity karena mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas dalam proses pengadaan barang dan jasa.
- 2) Kompetensi sumber daya manusia tidak memperkuat pengaruh *e-planning* dan *e-budgeting* terhadap public sector integrity. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh kedua instrumen e-government tersebut lebih ditentukan oleh sistem, prosedur, dan regulasi yang berlaku, sehingga perbedaan tingkat kompetensi aparatur belum memberikan penguatan pengaruh yang signifikan terhadap integritas sektor publik.
- 3) Kompetensi sumber daya manusia mampu memperkuat pengaruh *e-procurement* terhadap public sector integrity. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan *e-procurement* sebagai bagian dari e-government dalam meningkatkan integritas sektor publik sangat bergantung pada kemampuan aparatur dalam memahami, mengoperasikan, dan mengawasi sistem pengadaan secara profesional dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyaruddin, M., & Akbar, R. (2017). The relationship between the use of a performance measurement system, organizational factors, and public service quality. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 28(4), 512–533. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-28-04-2016-B005>
- Ceschel, F., Hinna, A., & Scarozza, D. (2022). Public sector integrity: A systematic review of the literature. *Public Policy and Administration*, 37(3), 323–346. <https://doi.org/10.1177/0952076720934171>
- Ekowati, S. (2024). Analisis e-budgeting dalam meminimalisir praktik money politics pada pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 19(1), 45–58. <https://doi.org/10.35706/jak.v19i1.10214>
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate data analysis* (8th ed.). Cengage Learning.
- Herwanto, T., Nugroho, Y., & Putri, A. D. (2024). Human resource competence and the effectiveness of e-government implementation. *Public Organization Review*, 24(2), 411–429. <https://doi.org/10.1007/s11115-023-00712-4>
- Hochstetter, J., Hofmann, S., & Krcmar, H. (2023). E-procurement systems and fiscal efficiency: A global perspective. *Government Information Quarterly*, 40(3), 101832. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2023.101832>
- Iriyani, S., & Mutmainah, S. (2024). Pencegahan korupsi melalui integrasi e-planning dan e-budgeting pada pemerintah provinsi. *Jurnal Akuntansi Publik*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.21070/jap.v5i1.1643>
- Janićijević, N. (2014). The institutional theory of organizations as a basis for understanding organizational structure. *Economic Themes*, 52(1), 11–30. <https://doi.org/10.1515/ethemes-2014-0002>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Manurung, D. T. H., Hidayat, A., & Handayani, S. (2019). Internal control system, financial accountability and the quality of local government financial statements. *Journal of Accounting and Investment*, 20(3), 232–247. <https://doi.org/10.18196/jai.2003128>
- Maria, S., & Halim, A. (2021). The influence of e-planning and e-budgeting on the quality of local government financial reports. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 4(1), 56–68. <https://doi.org/10.24198/jaab.v4i1.31245>
- Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony. *American Journal of Sociology*, 83(2), 340–363. <https://doi.org/10.1086/226550>
- Prayoga, I., & Yuhertiana, I. (2021). E-budgeting as a corruption prevention tool: A systematic literature review. *Journal of Accounting and Strategic Management*, 4(1),

-
- 13–25. <https://doi.org/10.33005/jasm.v4i1.67>
- Rustiarini, N. W. (2019). Can e-government control corruption? Evidence from Indonesia. *International Journal of Public Sector Management*, 32(5), 482–501. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-02-2018-0056>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Winarni, D., & Zamakhsyari, A. (2022). E-government implementation and its impact on financial accountability in Indonesian local governments. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 7(1), 45–56. <https://doi.org/10.30871/jaat.v7i1.3892>
- Yadav, P. (2024). The ethics of integrity in the public sector: A global perspective. *Ethics and Information Technology*, 26(1), 4–18. <https://doi.org/10.1007/s10676-023-09745-z>